

PEMBELAJARAN PKN SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA

Hemafitria¹, Hadi Rianto²

^{1,2}Program Studi PPKn
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak
Jalan Ampera No. 88 Pontianak 78116
e-mail: nuadly14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan peran pembelajaran PKN sebagai wahana pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan mengembangkan pembinaan terhadap partisipasi pemilih pemula melalui kegiatan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini mengkaji mulai dari fenomena nyata pembinaan partisipasi pemilih pemula melalui pembelajaran PKN serta pembinaan pemilih pemula dalam menghadapi pemilu. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pembinaan partisipasi pemilih pemula secara nyata di sekolah dilaksanakan dengan memberikan pemahaman dan arahan tentang partisipasi aktif pemilih pemula sebagai warga negara, membangun sikap demokratis dan kebersamaan, dan memperkenalkan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Dalam proses pembelajaran, pembinaan partisipasi politik pemilih pemula dilaksanakan dengan menyelenggarakan diskusi kelas dengan tema politik, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan politik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk turut serta dalam aksi politik.

Kata Kunci: Partisipasi politik, dan Pemilih Pemula.

Abstract

This study was conducted to optimize the role of teaching civics as a vehicle for political education for voters to develop guidance on the participation of voters through learning activities. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Collected data through observation, interviews, literature study and documentation. This study examines the start of a real phenomenon coaching beginner voter participation through civic education teaching and coaching voters for the elections. From this study it was found that fostering participation in real-time voters in schools implemented by providing insight and direction on the active participation of voters as citizens, to build a democratic attitude and togetherness, and introducing a system of governance prevailing in Indonesia. In the learning process, fostering the political participation of voters conducted by class discussions with political themes, provides the opportunity for students to participate in political activities and provide an opportunity for students to participate in political action.

Keywords: Political Participation and Beginner Voter

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian penting dari pembentukan warga negara yang baik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kerr (Winataputra

dan Budimansyah, 2007: 4) yang mengatakan bahwa “*Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young for their roles and responsibility as citizens and in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process, citizenship or civics education*”. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.

Tahun 2014 adalah tahun politik bagi Indonesia, karena Indonesia melaksanakan sejumlah kegiatan politik yang melibatkan seluruh warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas dalam pesta demokrasi untuk pemilihan anggota legislatif (anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah/Senator dan DPRD) dan kabinet pemerintahan baru (Presiden, Wakil Presiden dan para menteri).

Pada tahun 2014 ini pula, Indonesia menggelar pesta demokrasi tepatnya pada bulan April 2014, masyarakat Indonesia akan secara langsung memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD untuk periode jabatan 2014 – 2018. Sedangkan di bulan Juli 2014, masyarakat Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk menggantikan Presiden dan Wakil Presiden RI saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada www.antara.net.id (2014: 01/02) data di unduh pada hari sabtu tanggal 1 maret 2014, informasi tersebut memaparkan tentang data yang dirilis KPU dinyatakan bahwa: Jumlah total pemilih yang telah terdaftar untuk pemilu tahun 2014 adalah sejumlah 186.612.255 orang penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut 20-30% nya adalah Pemilih Pemula. Dalam pendidikan politik, kelompok muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu disebut dengan Pemilih Pemula. Pemilih Pemula ini terdiri dari mahasiswa dan siswa SMA yang akan menggunakan hak pilihnya pertama kali di tahun 2014 nanti.

Pada Pemilu 2004, jumlah Pemilih Pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih. Pada Pemilu 2009 sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih. Data BPS 2010: Penduduk usia 15-19 tahun berjumlah 20.871.086 orang, dan usia 20-24 tahun berjumlah 19.878.417 orang. Dengan demikian, jumlah pemilih muda sebanyak 40.749.503 orang. Dalam pemilu, jumlah itu sangat besar dan bisa menentukan kemenangan partai politik atau kandidat tertentu yang berkompetisi dalam pemilihan umum.

Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilu. Akan tetapi, hak itu harus diatur dengan cara menetapkan syarat tertentu agar terjadi keteraturan dalam proses politik. Syarat tersebut antara lain merupakan WNI yang berusia minimal 17 tahun, sudah/pernah menikah, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), bukan anggota TNI/Polri aktif, tidak sedang dicabut hak pilihnya, khusus untuk Pemilukada, calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, besarnya potensi pemilih pemula tersebut harus mendapatkan perhatian khusus sehingga mereka tidak menjadi subject yang disalah- gunakan oleh berbagai kalangan yang mejadi peserta pemilu 2014 ini. Oleh karena itu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu di tahun 2014 ini, pendidikan politik perlu dilaksanakan di persekolahan sehingga pemilih pemula (siswa yang siap ikut pemilu) dapat turut serta dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu 2014.

Selain memiliki banyak kelebihan, Pemilih Pemula juga memiliki kekurangan, yakni belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilu. Pemilu mendatang merupakan pengalaman pertama bagi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Karena belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, pada umumnya banyak dari kalangan mereka yang belum mengetahui berbagai hal yang terkait dengan pemilihan umum. Mereka juga tidak tahu bahwa suaranya sangat berarti bagi proses politik dinegaranya. Bahkan tidak jarang mereka enggan berpartisipasi dalam pemilu dan memilih ikut-ikutan tidak mau menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput).

Hasil survei yang KPU tahun 2013 seperti yang informasi yang diperoleh dalam www.antara.net.id (2014: 01/02) menunjukkan 67,55% Pemilih Pemula belum mengetahui secara persis tahapan dan sistem pemilu. Tidak hanya itu, sebanyak 76,40% bahkan mengaku tidak tahu jumlah kontestan partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan pemilih pemula untuk berpartisipasi pada Pemilu 2009 lalu masih sangat rendah. Sikap ini terlihat dari 91,01% responden menyatakan tidak bersedia turut serta dalam kegiatan kampanye.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian penting dari pembentukan warga negara yang baik. Sejalan dengan asumsi ini, Somantri (2001: 299) mendefinisikan Pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai: Pendidikan Kewarganegaraan program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jika ditinjau dari tujuannya, Pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional, maka partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan dari sejumlah kompetensi yang diperlukan, yang terpenting adalah penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, pengembangan karakter dan sikap mental tertentu dan komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokraasi konstitusional.

Zamroni (2001: 6) berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas penanaman kesadaran kepada generasi baru. Demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan proses yang dilakukan oleh lembaga

pendidikan siswa dibekali orientasi sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian penting dari pembentukan warga negara yang baik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 4) yang mengatakan bahwa: "*Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young for their roles and responsibilities citizens and in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process atau, citizenship or civics education*". Selanjutnya Menurut Cogan (1994: 4), Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan "*the foundation course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult live. "Citizenship Education or Education for Citizenship", ... both these in school experiences as well as out of school or non formal an formal learning which takes place in the family, the religious organization. Community organizations, the media, etc which help to shape the totally of the citizens*".

Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah mata pelajaran yang berbasis keilmuan, sebab benar-benar bersandar pada disiplin-disiplin keilmuan, dengan demikian terbebas dari pengaruh kekuasaan. Disiplin keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah kewarganegaraan dan hukum, selain itu disiplin ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan filsafat politik merupakan komponen utama dari Pendidikan Kewarganegaraan. Secara terperinci Wahab dan Sapriya (2011: 315), mengatakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;

(4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan umum dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*). Mempertegas tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, Wahab dan Sapriya (2011: 311), mengidentifikasi bahwa: Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya (*socially sensitive, socially responsible, dan socially intelligence*), memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berpikir kritis kreatif, dan inovatif agar dicapai kualitas dan perilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik (*socio civic behavior and desirable personal qualities*).

Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terdapat dua tipe pengajaran politik yaitu PKn (*civic education*) dan indoktrinasi politik. Untuk membedakan antara kedua tipe itu, bahwa PKn atau latihan kewarganegaraan (*civic training*) merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya, dan yang dimaksud dengan indoktrinasi politik lebih memperhatikan belajar ideologi politik tertentu yang dimaksudkan untuk merasionalisasi dan menjustifikasi rezim tertentu.

Perubahan politik di Indonesia seperti pendapat Alfian (1992: 235) dalam bukunya *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* menyatakan “Pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun”. Konsekuensi yang harus dijalankan Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan proses mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan

memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation*, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga tidak saja menguntungkan bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat.

PKn sebagai pendidikan politik merupakan salah satu bentuk sosialisasi politik telah memiliki teori yang sangat kuat dan jelas. Dikatakan kuat, sampai dewasa ini tampak belum ada bantahan bahwa PKn (*Civic Education/Citizenship Education*) menganut sistem teori tertentu, bahkan diperkuat lagi dengan teori pemberdayaan warga negara (*citizen empowerment*) melalui pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dalam rangka mengembangkan masyarakat kewargaan (*civil society*). Untuk kepentingan *civil society* juga telah dikembangkan teori/pendekatan politik kewarganegaraan (*citizenship politics*). Politik kewarganegaraan (*Citizenship politics*) memandang warga negara sebagai pusat dan aktor utama baik dalam wacana maupun praksis politik dan pembangunan. Pendekatan struktural prosesual, melihat proses politik (demokrasi) dalam konteks sosio-historis yang melekat serta menyentuh hubungan negara dan masyarakat. Kemudian masuknya demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial (termasuk dalam hukum), hendaknya dipahami bahwa demokrasi politik sebagai demokrasi primer sebagai basis bagi pengembangan demokrasi ekonomi dan sosial. Dan berkembangnya demokrasi sekunder ini (demokrasi ekonomi dan sosial) juga akan sangat menentukan bagi pengembangan demokrasi.

Bentuk partisipasi politik yang diberikan haruslah partisipasi yang bertanggung jawab agar sejalan dengan peraturan hukum dan norma moral yang berlaku dalam masyarakatnya. Tanggung jawab warga negara (*citizen responsibility/civic responsibilities*) menurut CCE (1994 :37) diantaranya dapat dicontohkan: (1) Melaksanakan aturan hukum; (2) Menghargai hak orang lain; (3) Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya; (4) Melakukan kontrol terhadap para pemimpin yang dipilihnya dalam melaksanakan tugas – tugasnya; (5) Melakukan komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah local, pemerintah nasional; (6) Memberikan suara dalam suatu pemilihan; (7) Membayar pajak; (8) Menjadi saksi di pengadilan; (9) Bersedia untuk mengikuti wajib militer, dsb.

Pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden (UU Pilpres, 2008: 7). Keberadaan pemilih pemula sering dikaitkan dengan keberhasilan suatu partai karena jika satu partai mendapatkan pemilih pemula dengan jumlah yang besar maka akan mendapatkan suara yang unggul dalam pemilu, karena jumlah pemilih pemula lebih dari setengah jumlah pemilih pemilu. Pemilih pemula di Indonesia masih memilih berdasarkan besar namanya suatu partai, bukan karena visi dan misi partai tersebut. Sehingga diperlukan kecakapan bagi pemilih pemula agar dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan cerdas.

Partisipasi politik sangat terkait dengan seberapa jauh demokrasi diterapkan dalam pemerintahan. Negara yang telah stabil demokrasinya, maka biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Karena begitu luasnya cakupan tindakan waganegara biasa dalam menyalurkan aspirasinya, maka tak heran bila bentuk-bentuk partisipasi politik ini sangat beragam. Hanya melalui partisipasi seluruh warga negara dalam kehidupan politik secara langsung dan berkelanjutan, negara dapat terikat ke dalam tujuan kebaikan sebagai kehendak bersama. (1) Terbentuknya organisasi politik maupun masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan Negara; (2) Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakn pemerintah; (3) Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya: berkampanye, menjadi pemilih aktif, menjadi anggota perwakilan rakyat; dan (4) Munculnya kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem *input* dan *output* kepada pemerintah, misalnya: melalui unjuk rasa, petisi, demonstrasi, protes.

Secara sederhana, bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: partisipasi politik konvensional, Partisipasi politik ini merupakan partisipasi politik yang normal dalam negara demokrasi modern. Dimana prosedur dan waktu

partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga. Bentuk partisipasi ini berupa: Pemberian suara (*votting*), Diskusi politik, Kegiatan kampanye, Membentuk atau bergabung dengan kelompok kepentingan, dan Komunikasi individual dengan pejabat politik. Partisipasi politik non-konvensional merupakan bentuk kegiatan partisipasi politik yang legal maupun *illegal*. Legal seperti petisi namun umumnya illegal karena penuh dengan kekerasan dan revolusioner. Dimana prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat yang melakukan partisipasi itu sendiri. Bentuk partisipasi ini berupa: Pengajuan petisi, Berdemonstrasi, mogok, dan konferensi, Tindakan kekerasan politik terhadap manusia, dan Perang gerilya, dan revolusi.

Berdasarkan paparan di atas, penulis membuat sebuah penelitian yang berfokus kepada tujuan untuk mendeskripsikan: (1) Fenomena nyata pembinaan pemilih pemula melalui pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan Presiden Tahun 2014; dan (2) Langkah nyata pembinaan pemilih pemula menghadapi pelaksanaan pemilihan Presiden Tahun 2014 melalui pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik di sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian *Ex Post Facto* dengan pendekatan kualitatif. Kerlinger (Sugiyono, 2011) berpendapat bahwa penelitian *ex post facto* adalah penemuan empiris yang dilakukan secara sistematis, peneliti tidak melakukan kontrol terhadap variable-variabel bebas karena manifestasinya sudah terjadi atau variable-variabel tersebut secara inheren tidak dapat dimanipulasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis serta literatur yang berkaitan dengan pembinaan pemilih pemula. Subjek dalam penelitian adalah Guru PKn dan Siswa yang siap mengikuti Pemilu pada Pilpres Tahun 2014 di SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 8 Kota Pontianak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, triangulasi, dan studi

literatur (Sugiyono, 2011: 225). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, *display* data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari keseluruhan data yang diperoleh melalui proses wawancara tersebut di atas tentang fenomena nyata pembinaan pemilih pemula melalui pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan Presiden tahun 2014 dapat di konstruksikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Pembinaan Pemilih Pemula melalui Pembelajaran oleh Guru PKn

No	Aspek Penelitian	Uraian Kegiatan Guru
1	PKn sebagai pendidikan politik.	Melakukan pembinaan pemilih pemula melalui kegiatan belajar mata pelajaran PKn dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman terhadap partisipasi aktif siswa sebagai warga Negara untuk memberikan hak pilihnya dengan benar.
2	PKn sebagai pendidikan demokrasi.	Membangun sikap demokratis melalui pembelajaran PKn. Sikap demokratis seperti kebersamaan, persamaan, kebebasan yang terukur, toleransi, kemerdekaan berpendapat, dan kemampuan menahan diri dapat diasah dan dikembangkan baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
3	PKn sebagai sarana Pembentukan warga negara yang aktif di masyarakat.	Memperkenalkan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, tokoh-tokoh calon Presiden 2014 dan asal-usul calon presiden tersebut, mulai dari biografi dan asal partainya.
4	PKn sebagai Sosialisasi politik.	Memberikan arahan kepada siswa akan pentingnya memberikan hak pilih sesuai dengan hati nurani, bukan atas paksaan dan pengaruh dari pihak lain.

Dari beberapa kesimpulan awal yang berkaitan dengan langkah-langkah nyata pembinaan pemilih pemula dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan Presiden tahun 2014 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Langkah-langkah Pembinaan Pemilih Pemula melalui Pembelajaran PKn

No	Aspek	Upaya Guru
1	Memberikan suara pada pelaksanaan pemilihan.	Mengingatkan siswa yang telah memenuhi syarat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilpres tahun 2014 sesuai dengan keinginan dan insiatif pribadi tanpa ada intimidasi maupun pengaruh dari pihak lain.
2	Mengikuti diskusi politik.	Melalui materi tersebut tentu saja siswa dapat berdiskusi dengan sesama siswa di bawah pengawasan guru PKn.
3	Ikut serta dalam kegiatan kampanye.	Memberikan kesempatan pada siswa mengikuti kegiatan kampanye politik selama tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
4	Turut serta dalam demonstrasi.	Memberikan kesempatan pada setiap pemilih pemula mengikuti kegiatan diskusi ataupun seminar, asalkan kegiatan yang diselenggarakan tersebut resmi.

Pembahasan ini akan diuraikan kembali temuan-temuan yang telah dideskripsikan pada uraian sebelumnya yang kemudian dianalisis dan dikomparasi dengan konsep dan teori yang menjadi landasan pustaka dalam penelitian ini. Berikut disajikan berdasarkan fokus kajian penelitian ini, yakni fenomena nyata pembinaan pemilih pemula melalui pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan Presiden Tahun 2014. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diperoleh informasi bahwa fenomena nyata pembinaan pemilih pemula melalui pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik dapat dilaksanakan, namun untuk melaksanakan itu PKn harus dimaknai sebagai pendidikan politik, demokrasi, sarana pembentukan warga negara yang aktif di masyarakat dan PKn dimaknai sebagai sosialisasi politik.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional. Pelaksanaan pembelajaran PKn di kelas harus dapat menggali serta membekali setiap pemilih pemula dengan pengetahuan tentang kajian Kekuasaan dan politik yang meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi. Dengan bekal tersebut, tentu saja tujuan Pendidikan secara umum seperti: (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dapat tercapai.

Pembinaan pemilih pemula melalui pembelajaran PKn dapat dilaksanakan melalui beberapa aspek berikut: (1) Melakukan pembinaan pemilih pemula melalui kegiatan belajar mata pelajaran PKn dengan cara memberikan pemahaman terhadap partisipasi aktif siswa sebagai warga negara (pemilih pemula) untuk memberikan hak pilihnya dengan benar; (2) Membangun sikap demokratis melalui pembelajaran PKn meliputi: kebersamaan, persamaan, kebebasan yang terukur, toleransi, kemerdekaan berpendapat, dan kemampuan menahan diri. Dengan sikap demokrasi tersebut, siswa akan menjadi pemilih yang produktif, pemilih yang tahu pemimpinnya, dan pemilih yang tahu bagaimana cara mengambil sikap jika pemimpin pilihannya tidak terpilih; (3) Mensosialisasikan politik melalui kegiatan belajar mengajar dikelas adalah dengan memberikan arahan kepada siswa untuk memberikan pilihan sesuai

dengan hati nurani, bukan atas paksaan dan pengaruh dari pihak lain; (4) Turut serta dalam mensukseskan program negara, salah satunya adalah mensukseskan pemilu dengan memberikan hak pilihnya dengan benar.

Langkah nyata pembinaan pemilih pemula menghadapi pelaksanaan pemilihan Presiden Tahun 2014 melalui pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik di sekolah. Pembelajaran PKn dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi politik. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Budiardjo (2008: 407) bahwa: Sosialisasi politik diartikan sebagai proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentuka sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Agar pemilih pemula tertarik untuk berpartisipasi dalam bidang politik, terutama dalam hal memberikan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu secara umum maupun pada saat Pilpres 2014 khususnya, maka diperlukan sebuah kegiatan sosialisasi baik dari masyarakat khususnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan tentu saja guru PKn dengan tujuan untuk membekali pemilih pemula tentang sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

Agar proses sosialisasi politik itu dapat berjalan dengan baik maka diperlukan langkah nyata pembinaan pemilih pemula dalam menghadapi pelaksanaan Pilpres 2014 melalui pembelajaran PKn seperti informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sebagai berikut: (1) Mengingatkan siswa (pemilih pemula) untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilpres 2014; (2) Menyenggarakan diskusi kelas dengan tema politik; (3) Memberikan kesempatan kepada pemilih pemula untuk mengikuti kegiatan politik seperti ikut berpartisipasi dalam debat politik di lingkungan pelajar, dan menjadi member/anggota pada sebuah organisasi politik; (4) Memberikan kesempatan pada pemilih pemula untuk turut serta dalam aksi politik seperti mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang diikuti.

SIMPULAN

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Fenomena nyata pembinaan pemilih pemula melalui pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan Presiden Tahun 2014 dilaksanakan dengan: (a) Membangun sikap demokratis seperti kebersamaan, persamaan, kebebasan yang terukur, toleransi, kemerdekaan berpendapat, dan kemampuan menahan diri melalui pembelajaran PKn, Kemudian sikap demokratis dapat diasah dan dikembangkan baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat; (b) Memberikan pemahaman tentang partisipasi aktif pemilih pemula sebagai warga negara untuk memberikan hak pilihnya pada setiap dengan benar; (c) Memperkenalkan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, tokoh-tokoh calon Presiden 2014 dan asal-usul calon presiden tersebut, mulai dari biografi dan asal partainya; (d) Memberikan arahan kepada siswa untuk memberikan pilihan sesuai dengan hati nurani, bukan atas paksaan dan pengaruh dari pihak lain; (2) Langkah nyata pembinaan pemilih pemula menghadapi pelaksanaan pemilihan Presiden Tahun 2014 melalui pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik di sekolah dilakukan dengan: (a) Mengingatkan siswa (pemilih pemula) untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilpres 2014; (b) Menyelenggarakan diskusi kelas dengan tema politik; (c) Memberikan kesempatan kepada pemilih pemula untuk mengikuti kegiatan politik seperti ikut berpartisipasi dalam debat politik di lingkungan pelajar, dan menjadi member/anggota pada sebuah organisasi politik; (d) Memberikan kesempatan pada pemilih pemula untuk turut serta dalam aksi politik seperti mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang diikuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1992. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Budimansyah & Winataputra. 2007. *Civic Education Konteks, Landasan Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI.
- CCE. 1994. *National Standards for Civic and Government*. Calabasas California.
- Miles & Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-motode Baru*. Jakarta : Universitas Indoneisa Press.
- Moleong, L.J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soemantri, N. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Pilpres Tahun 2008.
- Wahab, A.A. & Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Biograf Publishing.